

**PERANAN BENDAHARAWAN DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DI BAGIAN
KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA BINJAI**



SKRIPSI

ALFIAN

NPM : 00 850 0060

Program Studi Ilmu Pemerintahan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2004

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANAN BENDAHARAWAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DI BAGIAN KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA BINJAI
Nama Mahasiswi : ALFIAN
No. Stambuk : 00 850 0080
Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Drs. H.M. Yusuf Harahap)

(Hj. Aminatun Nasution, SH)

Ketua Jurusan

Mengetahui :

Dekan

(Drs. H.M. Yusuf Harahap.)



(Dra. Nina Siti S. Sir, MSi.)

Tanggal lulus :

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “PERANAN BENDAHARAWAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI BAGIAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI”.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Ibu Dra. Nina Siti S. Sir, MSi selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- Bapak Drs. H.M. Yusuf Harahap, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area serta sebagai dosen

Pembimbing I penulis,

- Ibu Hj. Aminatun Nasution, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Ibu Erlina Zuraida Pulungan, SE, selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai beserta rekan-rekan kerja dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis. Begitu juga buat isteri dan anak-anak tercinta yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan motivasi, selama penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2004

Penulis

ALFIAN
NPM : 00 850 0080

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Hipotesis	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Pemerintahan	9
B. Pengertian Administrasi Keuangan	10
C. Pelaksanaan Administrasi Keuangan	20
D. Pentingnya Administrasi Keuangan	21
E. Jenis-Jenis Bendaharawan	22
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Populasi dan Sampel	31
B. Metode Pengumpulan Data	32
C. Variabel dan Definisi Operasional	33
D. Teknik Analisis Data	34

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	35
A. Sejarah Ringkas Kota Binjai	35
B. Sejarah Singkat Pemerintahan Kota Binjai	37
C. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Binjai	40
D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bendaharawan Kota Binjai	42
BAB V. ANALISIS DATA	47
A. Mekanisme Kerja Administrasi Keuangan Pada Kantor Walikota Binjai	47
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Bendaharawan Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan	55
C. Hubungan Bendaharawan Dengan Keberhasilan Kerja Kantor Walikota Binjai	57
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hal pelaksanaan pembangunan, keuangan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan cukup penting dalam melaksanakan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu masalah keuangan ini membutuhkan pengelolaan yang baik. Tanpa pengelolaan yang baik kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat terhambat. Dana-dana yang tersedia harus dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Masalah keuangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini telah mempunyai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan dan perundang-undangan ini antara lain mencakup sistem perencanaan, pemanfaatan dan juga tanggung-jawab. Jika aturan dan perundang-undangan ini diabaikan maka dapat dipastikan sasaran pembangunan yang telah ditentukan tidak akan tercapai.

Suatu unsur penting yang dipakai dalam menjaga kelancaran pengelolaan keuangan ini adalah administrasi keuangan. Administrasi keuangan ini dimiliki oleh semua unsur atau badan yang terkait dalam melaksanakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Baik instansi negeri maupun swasta, pada instansi negeri, administrasi keuangan ini biasanya disebut dengan administrasi keuangan negara. Administrasi

keuangan ini harus dikelola dengan baik karena dana yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Pengelolaan keuangan ini mencakup kegiatan perencanaan, pembiayaan, pengawasan serta masalah-masalah keuangan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku inilah yang dikatakan dengan kegiatan administrasi keuangan negara.

Dalam administrasi keuangan terdapat beberapa masalah penting yakni : Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan, akuntansi, laporan dan pengawasan di satu pihak dan penggunaan dana di pihak lain.

Dalam sistem perencanaan, pelaksanaan akuntansi, laporan dan pengawasan memerlukan organisasi sebagai wadah. Organisasi disini dimaksudkan bukan hanya organisasi yang bersifat sosial atau yang mempunyai ruang lingkup kecil seperti yang ada di kelurahan, misalnya organisasi pemuda, organisasi ibu-ibu dan organisasi lainnya, tetapi juga meliputi organisasi yang mempunyai ruang lingkup yang besar seperti perusahaan dagang sampai kepada organisasi yang disebut dengan negara. Organisasi merupakan wadah atau tempat orang bekerjasama atau tempat melaksanakan administrasi.

Sekretariat Wilayah Daerah Sumatera Utara adalah satu instansi pemerintah yang mempunyai peranan besar dalam pemerintahan di Propinsi Sumatera. Biro Keuangan adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di bawahnya sedangkan Bendaharawan Biro Keuangan adalah salah satu Bidang dalam pelaksanaan tugas Biro tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokroamijoyo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Djoefri Abdullah, *Pokok-Pokok Bekerjanya Garis Edar Anggaran Daerah*, Cipta Rukun Sarana, Jakarta, 1994.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi research Sosial*, Alumni, Bandung, 1990.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tanggal 8 – 10 1992 No. 954/2572/1992.*
- Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1990.
- RA, Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1993.
- Soewarno Handayangirat, *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung, 1996.
- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Penerbit Angkasa, Jakarta, 1990.
- Taliziduhu Ndraha, *Methodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina aksara, Jakarta, 1993.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1990.